PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PULAUHALANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh: Julian Syafardi

Program Kekhususan : Hukum Pidana Pembimbing I: Dr. Erdianto

SH.,M.Hum Pembimbing II: Adi Tiara Putri SH.,MH

Alamat: Jl. Budi Daya, Gg. Budi Ahmad Pekanbaru

Email / Telepon : Syafardijulian@gmail.com / 0896-4837-7779

ABSTRACT

Illegal fishing enforcement requires extraordinary law enforcement efforts that integrate strength between government agencies related to the right strategy, utilize the latest technology so that it can run effectively and efficiently, be able to cause a deterrent effect, and be able to restore state losses. Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

This type of research can be classified in the juridical sociological research type, because in this study the author directly conducts research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted on Halang Rokan Hilir Island, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data and secondary data, and tertiary data, data collection techniques in research. this with interviews and literature study. From the results of the research, it can be found that law enforcement of fisheries crime The implementation of law enforcement and prosecution of perpetrators of illegal fishing at the Rokan Hilir Resort Water Police Unit is carried out by law enforcement officials including preventive and repressive measures. Preventive and repressive law enforcement has not been maximally implemented. It can be seen that there is still illegal fishing that has not been processed by law enforcement officers at the Rokan Hilir Resort Police.

Keywords: *fishery crime*

PENDAHULUAN

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan.¹

Sayangnya sudah 5 (lima) tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hukum di wilayah perairannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai

¹ Marhaeni, Rio Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm. 112-113.

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (dibawah Kementerian Perhubungan), yang menggunakan prinsip *multi agency multi task*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1 Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Di Lakukan Secara Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir

Aktivitas perikanan di Pulau Halang Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan yang menjadi salah satu pencarian utama bagi masyarakat. Daerah yang di kelilingi oleh lautan menjadi pulau sebagai salah satu sumbangsi maritim bagi bangsa Indonesia dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, khususnya di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan alat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²

Illegal Unreforted and Unregulated (IUU) Fishing dapat di katagorikan dalam tiga kelompok (1) *illegal fishing* yaitu kegiatan

² Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol Di Kutai Kartanegara Law Enforcement Of Offender Using Dogol Fishing Tools In Kutai Kartanegara," *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Hlm 10

penangkapan ikan illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari Negara tersebut,

(2) *unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu Negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Negara tersebut, (3) *unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah ZEE suatu Negara yang tidak di laporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapnya.³

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pelaku melakukan tindak pidana perikanan dengan menggunakan alat tangkap trawls, pukat, yaitu sebagai berikut:

1. Nuryadin menggunakan alat tangkap trawls

Melakukan tindak pidana tersebut adalah di dasarkan atas unsur kesengajaan, selain itu, dia melakukan tindak pidana karena di dasarkan perekonomian untuk menghidupi keluarganya.⁴

2. Supri menggunakan alat tangkap pukat

Menggunakan alat tangkap pukat dalam penangkapan ikan dapat merusak keberlangsungan sumber daya ikan. Supri melakukan tindak pidana perikanan di dasarkan atas unsur

kesengajaan. Alasannya melakukan tindak pidana tersebut adalah karena tidak mengetahui adanya batas atau larangan penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang menurutnya tidak merusak sumber daya ikan.⁵

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April Tahun 2017, bertepatan di wilayah perairan Pulau Halang pada posisi 02⁰- 34⁰- 880⁰ LU- 100⁰- 22⁰- 856⁰ BT, tersangka Nuryadin melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan trawl. Penggunaan alat tangkap trawl pada dasarnya bertentangan dengan Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan API Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, sebab bisa merusak ekosistem biota laut. Namun, sayangnya meskipun alat tangkap sudah di larang untuk di gunakan akan tetapi masyarakat masih menggunakan yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, yang di perdayakan oleh oknum warga Negara asing untuk memperdayakan masyarakat pribumi untuk meraup keuntungan. Hal ini, di sebabkan lemahnya penegak hukum untuk melakukan pengawasan tindak pidana illegal fishing. Hal ini yang membuat celah melakukan *illegal fishing* di Pulau Halang Rokan Hilir dan sulit terealisasi supremasi hukum di bidang perikanan.

Pukat Hela (Trawls) merupakan kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang di lengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dengan pengoperasiannya dengan cara di hela

³ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Lampung. Vol 21 No 2 Desember 2014. Hlm. 7

⁴ wawancara penulis dengan Bapak Nuryadin pelaku penangkap ikan

⁵ wawancara penulis dengan Bapak Supri pelaku penangkap ikan

di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Berdasarkan data yang di dapat dari Satuan Polisi Air Resor Rokan Hilir tahun 2017 sampai 2019 terdapat 3 kasus nelayan yang masih menggunakan alat tangkap Pukat Hela (Traws) di perairan Pulau Halang.

Penangkapan ikan menggunakan pukat (jaring) tarik. Pukat tarik (seine nets) kelompok alat penangkapan ikan berkantong (cod-end) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasian Pukat tarik (seine nets) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya.⁶

pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana di maksud huruf b terdiri dari

- a. Dogol (Danish seines)
- b. Scottish seines

⁶ Ixora Adhitama, Rukmana Amanwinata, Hernadi Affandi, "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, Vol. 08; No. 02; Tahun 2017. Hlm.10

- c. Pair seines
- d. Paying
- e. Cantrang: dan

Bahwa pada hari Kamis 18 Februari 2018 bertepatan di wilayah perairan Pulau Halang pada posisi 02⁰- 35⁰- 000 LU- 100⁰-22⁰- 800⁰ BT pelaku Untak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat/jaring. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Sat Polair Resort Rokan Hilir mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap pukat tarik itu mengakibatkan kerusakan ekosistem biota laut, serta mengakibatkan kerugian bagi nelayan pribumi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷ Namun sayangnya banyak para pelaku baik dari nelayan itu sendiri sarta pengusaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini di sebabkan lemah penegak hukum strategisnya oknum untuk melakukan pengawasan tindak pidana illegal fishing, hal ini yang menjadi celah berlangsung *illegal fishing* di Pulau Halang Rokan Hilir dan sulit terealisasinya supremasi hukum di bidang perikanan.

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Ilegal Sebagai Objek Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir

Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-

⁷ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Riswan Effendi, Ps Kanit Gakkum Sat Polair Resort Rokan Hilir

negara maju didunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakan tertib hukum, serta melindungi masyarakat hukum. Suatu sistem hukum semestinya ditentukan oleh tiga hal yaitu, Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini semestinya bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan baik dan efektif. Substansi hukum berupa materi-materi peraturan perundang-undangan tidak akan ada pertentangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup. Struktur hukum dibangun oleh masyarakat berdasarkan karakter budaya hukum akan sejalan dengan substansi dan struktur hukum.⁸

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya yang termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumuman informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegak hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsung produktifitas

⁸ Erdianto Effendi, "Makelar/Mafia Hukum, Operndi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Edisi I, No, 1Agustus 2010, Hlm. 35

sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah di sepakati dalam kata lain, proses dan mekanisme penegakkan hukum pidana illegal fishing dan/atau pencurian ikan, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan republik indonesia dengan wilayah periaran/potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan.⁹

Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan illegal adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum terhadap pelaku penangkapan ikan illegal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari sat polair rokan hilir

⁹ Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono, Purwoto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Hlm.3

2017-2018 terdapat tiga (3) kasus penangkapan ikan ilegal sebagai objek penangkapan ikan ilegal yang tercatat di buku Sat Polair Rokan Hilir. Dari sekian kasus penangkapan ikan *illegal* dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pelaku menggunakan alat-alat yang di larang oleh pemerintah sehingga hal ini perlu penanganan hukum agar tidak terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal.

Berdasarkan data penanganan perkara Sat Pol Air Polres Rokan Hilir di Pulau Halang dengan Nomor Laporan Polisi No.Pol:LP/01/IV/2017/Res Rohil/Polair. Bahwa tersangka M.Imron pada hari Rabu 01 April 2017 atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017, bertempat di wilayah perairan Pulau Halang, pelaku dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) perbutan tersangka dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2017 pada saat tersangka di atas kapal sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap

jenis trawl, kemudian datang polisi melakukan pemeriksaan di atas kapal, Nahkoda kapal tersangka M.Imron di minta untuk menunjukkan Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) habis masa berlakunya pada tanggal 23 Desember 2016, dan di temukan jaring ikan jenis trawl di dalam kapal tersangka. Bahwa perbutan tersangka pada saat tertangkap menunjukkan SIUP tetapi sudah habis masa berlakunya di anggap sudah tidak berlaku lagi dan tidak ada kebijakan/ kemudahan untuk hal tersebut. Perbutan tersangka sebagaimana di atur dalam dan di ancam pidana dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan

Dalam hal menanggulangi penangkapan ikan ilegal, Polisi sebagai bagian dari penegak hukum melakukan tindakan yang terdiri dari *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Dalam hal ini sat polair resort rokan hilir dalam memberantas tindak pidana penangkapan ikan ilegal di pulau halang rokan hilir untuk menegakan hukum di lakukan dengan upaya *preventif* dan upaya *represif*.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Merupakan segala usaha atau tindakan yang di lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi

agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal yaitu dengan memberi sosialisasi tentang penangkapan ikan yang di larang menurut undang-undang.

Kemudian upaya lain yang di lakukan oleh Sat Polair ResortRokan Hilir berupa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai aturan tentang malakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang- undang serta manjelaskan pentingnya menjaga ekosistembiota laut di pulau halang kabupaten rokan hilir, agar supaya pelaku penangkap ikan mematuhi aturan yang berlaku.¹⁰

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian

hari.

Adapun langkah-langkah upaya *represif* yang dilakukan Sat Polair Resort Rokan Hilir dalam hal penegak hukum pelaku penangkapan ikan ilegal antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaku penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps KanitGakkum Satpolair Resort Rokan Hilir. mengatakan bahwa apabila telah diterimahnya laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana dari seseorangataupun masyarakat maka akan segera melakukan tindakan penyelidikan ditempat terjadinya perkara (TKP). Dan Ps Kanit Gakkum Satpolair Resort Rokan Hilir akan melakukan

¹⁰ wawancara dengan Bapak AKP Sapto Hartoyo, Kepala Satuan Polisi Air Resort RokanHilir

tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan membawa seseorang serta menghadapkan seseorang kepada penyidik.¹¹

Tindakan penyidik terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh penyidik Sat Pol Air Resort Rokan Hilir seharusnya dapat dilakukan dengan diketahuinya sendiri seperti diadakannya kegiatan pengawasan, pengamanan.

b. Penyidikan

Apabila didalam proses penyelidikan telah ditentukan bahwa peristiwa tersebut tindak pidana maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Jalannya proses penyidikan yang di lakukan oleh penyidik sat

polair resort rokan hilir, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang;
- 2) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 3) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 4) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka
- 5) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 8) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 9) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis dari tiga (3) terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2018 ada tiga kasus penangkapan ikan ilegal. Menurut pendapat penulis hal ini belum bisa dikatakan berhasil

¹¹ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Riswan Effendi, Ps Kani Gakkum Sat Polair Resort Rokan Hilir

dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal yang terjadi setiap tahunnya di Pulau Halang Rokan Hilir. Sementara fakta di lapangan menerangkan bahwa panangkapan ikan ilegal masih banyak melakukan pelanggaran hukum namun yang di proses Cuma tiga (3) kasus yang di tangani oleh penegak hukum dan di tambah lagi minimnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum.

c) Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasahnya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Proses penangkapan terhadap pelaku atau tersangka pelaku penangkapan ikan ilegal penyidik Sat Polair Resort Rokan Hilir langsung melakukan upaya penangkapan apabila sudah memenuhi unsur dengan dugaan yang kuat itu didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup maka upaya penangkapan dapat dilakukan dengan cepat guna untuk kepentingan pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Polair Resort Rokan Hilir.

Upaya *represif* yang dilakukan oleh Sat Polair Resort Rokan Hilir dalam usaha menegakan hukum yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku penangkapan ikan ilegal maka dengan cara langsung melakukan penangkapan langsung dan tidak memberikan toleran. Penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal

selama ini sudah cukup baik tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran penangkapan ikan ilegal. Misalnya terhadap penangkapan ikan ilegal yang berupa suatu kejahatan yang termasuk pelanggaran yang sanksi pidananya berupa kurungan atau denda. Tindakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan secara *preventif* tidak di hiraukan oleh masyarakat, maka tindakan *represif* yang dilakukan oleh penegakan hukum. Akan tetapi tindakan *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sat Polair Resort Rokan Hilir tidak berjalan sehingga kasus penangkapan ikan ilegal tersebut berhenti ditahap penyidikan.

Masalah penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasikan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum maksimal. Karena masih adanya pelaku penangkapan ikan ilegal yang masih tidak terungkap karena terjadi kendala-kendala dalam proses penangkapan ikan ilegal. . Sehingga tidak terpenuhinya teori keadilan bagi nelayan Pribumi untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Halang. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar,

demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal-hal yang lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.¹² Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan keadilan bagi Nelayan Pribumi tidak terpenuhi teori keadilan karena pelaku tidak terungkap oleh penyidik sehingga pelaku bisa dengan leluasa bergerak dengan bebas tanpa ada merasa bersalah dan bisa menghirub udara segar dengan tenang. Pandangan Keadilan dalam Hukum Nasional Bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, tepatnya sila kelima yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsep hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Dari tujuan penegakan hukum di atas dapat dilihat bahwa penegakan hukum mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasikan atau dihapuskan jika tidak adil.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal-hal yang lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penangkap ikan tidak berjalan dengan baik, karena pelaku yang tidak di proses. Seharusnya penyidik bisa lebih efektif untuk menungkap pelaku penangkapan ikan ilegal tersebut agar pelaku tersebut tidak bisa bebas begitu saja agar nelayan pribumi merasa terpenuhi keadilan baginya. Tentu hal seperti ini adalah kejahatan yang menyimpang dari peraturan

¹² Muhammad Sadi, *Op, Cit*, hlm. 197.

¹³ Muhammad Sadi, *Op, Cit*, hlm. 197.

perundang-undangan yang harus di proses sesuai dengan perbuatan si pelaku penangkapan ikan ilegal tersebut.

Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana perikanan merusak sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl, Pukat (Jaring) tarik hal ini di sebabkan lemah penegak hukum strategisnya oknum untuk melakukan tindak pidana Perikanan, hal ini yang menjadi celah berlangsung Tindak Pidana Perikanan di Pulau Halang Rokan Hilir.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Satuan Polisi Air Resor Rokan Hilir dilakukan oleh aparat Penegak Hukum meliputi tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dan represif belum dapat terlaksana dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat masih adanya penangkapan ikan ilegal yang tidak di proses oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali.R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2006

- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Samarinda, 2012
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*: Bandung: Alumni, 2011
- Bambang Poernomo. *Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2009
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- _____, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum 2011
- Marhaeni, Rio Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bhumi Aksara. 2011
- Muhadar. *Hukum perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya

- Bakti, edisi 2. 2013
- Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Palembang, 2014, hlm. 186
- Polair Rokan Hilir. *Penanganan Perkara Sat Polair Oleh Bripka Riswan Effendi*. 2019. Kasus
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001
- Rokhimin Dahuri, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2012
- Shafrudin. *Politik Hukum Pidana*. B. Lampung: Universitas Lampung. 2011
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 2013
- Sudarsono, *Kenakalan remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2004
- Satjibto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishin, Semarang, 2009
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1996
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum & Keadilan*, Setara Press, 2011
- Sunyawati, Dina. *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011
- Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetty, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, 2011
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Unila Bandar Lampung. 2009
- _____. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011
- Wiryono Prodjodikoro. *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Erosco. 2011
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- wawancara dengan Bapak AKP Sapto Hartoyo, Kepala Satuan Polisi Air Resort Rokan Hilir
- wawancara penulis dengan Bapak Rahman Kepala Desa Pulau

- Halang
wawancara penulis dengan Bapak Nuryadin pelaku penangkapan ikan
- wawancara penulis dengan Bapak Supri pelaku penangkapan ikan
- wawancara penulis dengan Bapak Rolan E Bakara pelaku penangkapan ikan
- B. Jurnal/Wastlaw**
- Ari Wahyudi Hertanto, Hubungan Antara Aspek Sosiologi dan Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum LSD Vol. III*, Agustus-November, 2008
- Aris Munandar, Mukhlis.”Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl,”*Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 1(1) Agustus 2017,pp.13-22
- Arisandi,”Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jarring Trawl,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian* Universitas Airlangga. Vol.4.No 1. Maret 2016
- Chou Her, “Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers’ Association, Volume 50; Issue I, January, 2016
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The ”Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 26 Desember 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Eddy Rifai dan Khaidir Anwar,”Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan,” *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Lampung. Vol 21 No 2 Desember 2014
- Erdianto Effendi,”Makelar/Mafia Hukum, Operndi Dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Edisi I, No, 1 Agustus 2010
- Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia,” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol Di Kutai Kartanegara Law Enforcement Of Offender Using Dogol Fishing Tools In Kutai Kartanegara,”*Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
- Gibran Muhammad, Gunawan Jatmiko, Eko Roharjo,”Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi

- Ditpolair Polda Lampung),” *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017
- Ixora Adhitama,Rukmana Amanwinata, Hernadi Affandi,” Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut* , Vol. 08; No. 02; Tahun 2017
- Ketut Damika.”Penegak Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia,”*Jurnal Penelitian Hukum* Universitas Jayabaya. Vol.9|No.1
- Maria Maya Lestari.*Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan.*Junal Hukum .Volume 3 No. 2
- Pan Muhamad Faiz,”*Teori Keadilan John Rawls*”,*Jurnal Konstitusi*,2009, Volume 6 Nomor 1
- Putri Hikmawati.*Permasalahan Hukum Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Bidang Perikanan.**Jurnal Hukum*
- Puput Dewi Sartika. *Analisis Komposisi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Bubu Tiang Pada Waktu Pasang Dan Surut Di Perairan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.* *Jurnal Fisheries and Marine Science Faculty, Riau University.* 2013
- Oro, E dan O. Pontoh. *International Fisheries Policy (Kebijaksanaan Perikanan International).* Seri Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah Ilmu sosial Ekonomi Perikanan. Dharma Pendidikan. Laboratorium Ekonomi dan Bisnis Perikanan. Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2011
- Ruth Shella Widyatmodjo,Pujiyoyo,Purwoto,”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus:Putusan Pengadilan Negeri Ambon NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.A MB”,”*Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*,Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Suryaningsih,”peran kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di kabupaten sinjai.”*Jurnal Hukum.*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Widia Ederita, “Menciptakan Sebuah

Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus, 2010

C. Undang-Undang

Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan

Komersial

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Dan Perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Aturan Pelaksanaannya Lainnya Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana